

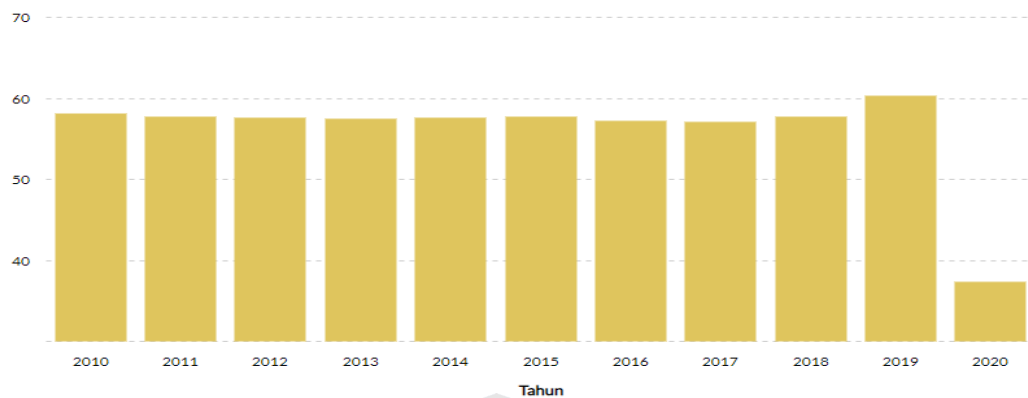
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era globalisasi yang tengah berlangsung, penurunan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara mungkin terjadi ketika sumber daya alam dan keterampilan penduduknya tidak lagi sejalan dengan dinamika ekonomi yang berkembang. Semakin rumitnya aktivitas ekonomi dan pola produksi, seiring dengan tuntutan kompleksitas kehidupan masyarakat, menghasilkan pergeseran fokus dari pemenuhan kebutuhan internal menuju pengembangan keahlian khusus pada bidang tertentu, (Dermawan, 2019).

Usaha yang dilakukan oleh individu, keluarga atau perusahaan kecil berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terus meningkat mencapai 65.465.497 unit pada tahun 2019, naik 1,98% dari tahun sebelumnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan terus menyesuaikan proses produksi dan berkembang dengan modal internal, UMKM tetap kuat menghadapi krisis ini dan tidak terpengaruh oleh utang luar negeri, (Puspitasari dan Astrini, 2021).



**Gambar 1.1 Kontribusi UMKM kepada PDB 2015-2020**

Sumber: Lokadata, 2021

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020. Kontribusi UMKM terhadap PDB menurun drastis menjadi 37,3% pada tahun 2020, jauh dari peningkatan 60,3% pada tahun 2019. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mencapai 23% lebih rendah dibandingkan 2019, ([www.lokadata.id](http://www.lokadata.id)). Menurut M Rudi Salahudin, Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, survei yang dilakukan oleh UNDP dan LPEM UI pada tahun 2020-2021 melibatkan 1.180 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa selama dua tahun pertama pandemi Covid-19, kondisi UMKM lokal menunjukkan penurunan. 48% UMKM mengalami masalah dengan bahan baku, 77% mengalami penurunan pendapatan, 88% mengalami penurunan peminatan produk, dan 97% mengalami penurunan produksi, ([www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)).

Dalam situasi seperti ini, UMKM harus terus meningkatkan kemampuan bisnisnya. Kinerja usaha kecil dan menengah merupakan komponen penting

dalam meningkatkan bisnis karena kinerja berfungsi sebagai ukuran kemajuan usaha. Kinerja UMKM sendiri dapat diukur melalui kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang pelaku UMKM miliki, (Kusumadewi, 2017). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola secara efisien akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerjanya, memberikan keuntungan dalam persaingan, dan perkembangan sektor UMKM itu sendiri, (Pricilia, 2019). Kinerja UMKM yang baik memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan, dan meningkatkan bisnis pelaku UMKM serta berfokus pada masa depan untuk mendapatkan keunggulan di tengah persaingan, (Nur *et al.*, 2020).

Sanistasya *et al.*, (2019) pada saat ini, hasil kinerja yang dicapai oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia cenderung menunjukkan tingkat yang kurang optimal, sehingga menimbulkan kesulitan bagi UMKM dalam menghadapi tantangan persaingan. Adanya kinerja yang rendah ini dapat diakibatkan oleh sejumlah faktor. Pricilia, (2019) banyak pelaku UMKM tidak memahami dasar keuangan. Ini mungkin karena kurangnya inklusi keuangan atau literasi keuangan yang rendah, yang berdampak pada kinerja UMKM.

Inklusi keuangan telah menjadi fokus utama bagi pemerintah sejumlah negara berkembang, di mana upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mencapai tingkat inklusi keuangan yang diinginkan, (Kusumaningtuti *et al.*, 2018). Inklusi keuangan hanya dapat dikatakan sukses jika seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan formal, (Desiyanti, 2020). Sedangkan menurut kepala dinas koperasi,

usaha kecil dan menengah kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan pemerintah Kota Bekasi terus mendukung dan meningkatkan UMKM di Kota Bekasi dengan mempunyai lembaga keuangan yang rutin memberikan bantuan terhadap UMKM di Kota Bekasi yakni BPR Patriot Syariah. Perguliran dana di BPR Patriot Syariah saat ini hampir 65 miliar, dari dana simpanan di bank tersebut, ([www.beritabekasi.co.id](http://www.beritabekasi.co.id)). Adanya lembaga keuangan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat, khususnya untuk UMKM. Salah satu faktor yang ditekankan pada UMKM untuk mengurangi masalah keuangan pelaku UMKM adalah inklusi keuangan, (Andriyani dan Sulistyowati, 2021). Faktor lain dalam meningkatkan kinerja UMKM adalah literasi keuangan.

Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kapasitas para pelaku usaha untuk secara cermat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan UMKM, dengan tujuan menjaga kelangsungan serta meningkatkan kesejahteraan usaha pada tahun yang akan datang, (Herdinata, 2021). Para pelaku usaha yang menguasai literasi keuangan dengan baik dapat menjadikan pelaku UMKM sebagai praktisi bisnis yang bijak dalam mengelola keuangan usaha. Tingkat literasi keuangan yang tinggi memberikan kemahiran kepada para pelaku usaha dalam mengelola keuangan dengan cermat, sehingga pelaku usaha dapat membuat keputusan yang tepat guna untuk kemajuan usaha UMKM, (Farhani *et al.*, 2021). Oleh karena itu, literasi keuangan sangat penting bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menghindari masalah keuangan. dengan pengetahuan dasar keuangan, pelaku UMKM dapat mengendalikan keuangan usaha sehingga menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang diharapkan. Jika

pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan ini, maka dapat menghadapi masalah hutang atau mendapatkan biaya kredit yang tinggi, sehingga kecil kemungkinan pelaku usaha akan mendapat kredit yang baik, (Suryani dan Ramadhan, 2017). Faktor lain dalam meningkatkan kinerja UMKM adalah pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan didefinisikan sebagai proses administrasi keuangan baik pada tingkat individual maupun kelompok, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan finansial, (Unsta, 2017). Dengan pengelolaan yang baik, pelaku UMKM dapat membuat keputusan keuangan yang tepat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sangat penting untuk kemajuan suatu usaha, (Fatwitawati, 2018).

Jumlah UMKM di Kota Bekasi meningkat dengan cepat, dengan 6.836 bisnis yang terdaftar di bawah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini terdiri dari berbagai usaha, seperti usaha makanan dan minuman, usaha fashion, usaha perdagangan, usaha handicraft, usaha jasa dan usaha lainnya, (Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, 2023).

**Tabel 1.1 Data jumlah UMKM di Kota Bekasi**

No	Kecamatan	Jumlah UMKM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bantar Gebang	-	-	138	94	30
2.	Bekasi Barat	27	16	272	228	88
3.	Bekasi Selatan	19	10	417	130	59
4.	Bekasi Timur	17	13	424	161	77
5.	Bekasi Utara	18	13	1.050	395	105
6.	Jatiasih	7	13	106	144	65
7.	Jatisampurna	18	11	50	72	19
8.	Medan Satria	13	11	510	84	28
9.	Mustika Jaya	17	14	522	109	54
10.	Pondok Gede	12	13	291	96	30
11.	Pondok Melati	5	10	133	69	12
12.	Rawa Lumbu	15	19	270	121	72

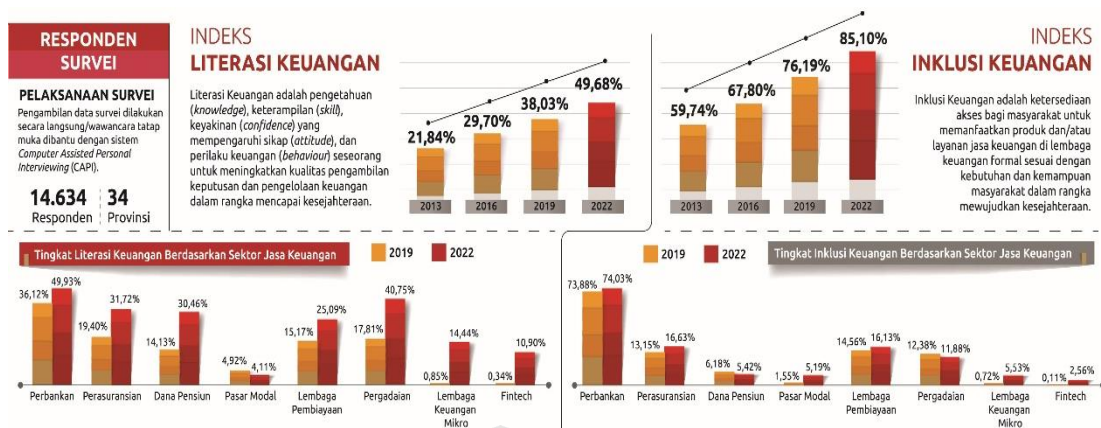
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi 2023

Berdasarkan data di atas jumlah UMKM di Kota Bekasi akan terus meningkat. Karena jumlah UMKM terus meningkat, pada tahun 2018 di kecamatan Bekasi Barat lebih tinggi, yaitu 27 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dan pada tahun 2018 yang paling terkecil yaitu Kecamatan Pondok Melati sejumlah 5 pelaku UMKM. Pada tahun 2019 jumlah UMKM yang meningkat berada di Kecamatan Rawa Lumbu berjumlah 19 pelaku UMKM sedangkan jumlah UMKM yang terkecil ada di Kecamatan Bekasi selatan dan Pondok Melati dan Bekasi selatan sejumlah 10 pelaku UMKM. Saat 2020 jumlah UMKM yang tertinggi berada di Kecamatan Bekasi Utara 1.050 pelaku UMKM dan yang terkecil berada di Kecamatan Jatisampurna berjumlah 50 pelaku UMKM. Jumlah UMKM tahun 2021 paling tertinggi berada di Kecamatan Bekasi Utara 395 pelaku UMKM dan yang terkecil berada di Kecamatan Jatisampurna 72 pelaku UMKM. Sedangkan tahun 2022 jumlah UMKM tertinggi berada di Kecamatan Bekasi Utara 105 pelaku UMKM dan yang terkecil berada di Kecamatan Pondok Melati 12 pelaku UMKM, (Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, 2023).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bekasi menghadapi masalah yang sama dengan UMKM di Kota lain. Salah satunya adalah kurangnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan yang secara konsekuensi menghambat pertumbuhan UMKM, (Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, 2023). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering mengabaikan pengelolaan keuangan mereka, terutama dalam hal penerapan standar pengelolaan keuangan dan akuntansi yang tepat, (Unsta, 2017). Kinerja UMKM kerap dihadapkan pada

cobaan dalam ranah akuntansi dan manajemen keuangan akibat pencatatan yang tidak memadai, pemanfaatan informasi akuntansi yang kurang optimal, yang pada akhirnya menghambat efisiensi dalam pengambilan keputusan keuangan, dan rendahnya tingkat keandalan data keuangan yang dihasilkan oleh usaha tersebut, (Tharmini dan Lakshan, 2021). Secara umum, kinerja UMKM cenderung terbatas pada pencatatan keuangan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran, dengan hanya sebagian kecil yang mencatat biaya sewa tempat sebagai beban. Akhirnya beberapa pelaku UMKM menganggap bahwa usaha mereka memperoleh keuntungan yang signifikan karena tidak adanya pencatatan yang memadai terhadap beban. Akibatnya, kondisi keuangan yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan keuangan sebenarnya, (Fatwitawati, 2018).

Teten Masduki, Menteri koperasi dan UKM, menyatakan bahwa pembiayaan sangat penting bagi UMKM untuk bertahan, terutama di tengah pandemi ini. Namun, rasio kredit perbankan bagi UMKM masih rendah, hanya 20 persen. Ini karena banyak UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan yang formal, ([www.moneykompas.com](http://www.moneykompas.com)). Menurut Adi Budiarmo, kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), inklusi keuangan UMKM yang rendah menyebabkan bantuan pemerintah menjadi lebih lambat. Menurutnya, karena sekitar 70% kinerja UMKM belum mendapatkan inklusi keuangan yang baik, mereka sulit mendapatkan bantuan finansial dari pemerintah, ([www.antarane.ws.com](http://www.antarane.ws.com)).



**Gambar 1.2 Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022

Hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10% meningkat dari tiga tahun sebelumnya, menurut OJK masyarakat Indonesia umumnya belum memahami dengan baik karakteristik produk dan layanan keuangan formal, ([www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)). Menurut Solichin, mengedukasi sebanyak 268 juta orang dengan latar belakang dan demografi yang beragam adalah tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, stakeholder seperti OJK dan 9 industri keuangan terlibat dalam tugas literasi keuangan, ([www.cnbcIndonesia.com](http://www.cnbcIndonesia.com)). Diharapkan kedepannya para pelaku usaha akan terus memperdalam pengetahuan mereka tentang literasi keuangan, karena memiliki pengetahuan tentang keuangan yang tinggi akan mendorong mereka untuk mengakses lembaga keuangan yang formal, (Zulkieflimansyah *et al.*, 2020).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Bekasi periode 2018-2022?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Bekasi periode 2018-2022?
3. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Bekasi periode 2018-2022?
4. Apakah inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kota Bekasi periode 2018-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada hasil dari latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Bekasi periode 2018-2022.
2. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Bekasi 2018-2022.
3. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Bekasi periode 2018-2022.
4. Untuk menguji pengaruh inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Bekasi periode 2018-2022.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaku UMKM yang ada di Kota Bekasi. Dengan menganalisis pengaruh inklusi keuangan, literasi keuangan, pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM, penelitian ini akan menambah wawasan tentang ilmu akuntansi di pelaku UMKM. Temuan empiris ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *Resources Based View Theory (RBV)* dan *theory of planned behavior*.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara menilai pengelolaan keuangan usaha dan keuangan pribadi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi usaha kecil dan menengah (UMKM) itu sendiri. Memberikan referensi dalam teori mengenai inklusi keuangan, literasi keuangan dan pengelolaan keuangan diharapkan agar temuan ini dapat diaplikasikan sebagai materi dalam proses pembelajaran. Penelitian ini juga diinginkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pengetahuan, khususnya bagi peneliti berikutnya yang menggambarkan atau merujuk pada aspek inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan. selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memperkaya wawasan ilmiah di ranah akuntansi, serta menjadi tambahan referensi yang berharga di perpustakaan.

### 3. Manfaat Regulator

Dengan adanya penelitian ini berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dan mengembangkan kebijakan serta merancang strategi internal untuk meningkatkan kinerja UMKM melalui inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah telah mencapai apa yang ingin dicapai atau apakah langkah-langkah tambahan harus diambil untuk meningkatkan inklusi keuangan, literasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan kinerja UMKM.

#### 1.5 Sistematika Tugas Akhir

Dalam menyusun skripsi ini, sistematika penulisan dibagi atas lima (5) bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

##### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi telaah teoritis, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis. Telaah teoritis berisi pengertian dari teori penelitian yaitu kinerja UMKM, inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan dan UMKM.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, definisi Operasional variabel dan skala ukurannya, dan metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian (sejarah Kota Bekasi, geografis dan demografis Kota Bekasi, populasi, sampel, karakteristik responden, distribusi jawaban, dan analisis data), dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

